

BAB II

INVASI JEPANG DI ASIA TENGGARA

Dalam perjalanan sejarah manusia, pertempuran sering terjadi dengan berbagai alasan, baik ekonomi maupun perebutan wilayah kekuasaan. Banyak sekali aspek-aspek penting yang dapat menentukan suatu pihak untuk memenangkan pertempuran. Pada BAB ini, penulis membahas beberapa aspek yaitu *Sejarah Invasi Jepang di Asia Tenggara*, lalu dikaitkan dengan *Operasi Militer yang Dilakukan Jepang*, *Masuknya Jepang ke Indonesia*, *Operasi Penyerangan Pulau Jawa*, serta *Imperialisme Jepang di Indonesia*, yang dikaitkan dengan *Penerapan dan Dampak yang terjadi di Lingkungan Pedesaan dan Pandangan Tokoh Nasionalis Indonesia Terhadap Politik Imperialisme Jepang*.

2.1. Sejarah Invasi Jepang di Asia Tenggara

Invasi Jepang ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk keinginan Jepang dalam menguasai negara-negara di kawasan Asia Tenggara menggantikan negara Barat. Sejak Restorasi Meiji, Jepang selalu berorientasi ke negara-negara Barat dan kesadaran Jepang sebagai anggota Asia sangat tipis. Namun, menjelang perang, Jepang mulai menegaskan kedudukannya sebagai anggota Asia dan mengklaim sebagai pemimpin Asia. Dari sana muncul sebuah ide bahwa Asia harus dipimpin atau dibina oleh bangsa Asia sendiri. Karena itu, berkembangnya sebuah ide bahwa Asia harus direbut serta dikuasai bangsa Asia. Bangsa Asia yang dijajah oleh negara Barat harus dibebaskan dari belenggu.

Perang Asia Timur Raya dimulai bukan dengan serangan di Pearl Harbour, melainkan dimulai dari pendaratan pasukan Jepang ke Semenanjung Malaya. Pada dinihari tanggal 8 Desember 1941, pasukan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sudah menunggu di Indocina Selatan menyeberang ke Teluk Siam dan mendarat di wilayah Thailand dan Malaya pada semenanjung itu. Barulah satu jam kemudian, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menyerbu Pearl Harbour (Hawaii). Serangan di Semenanjung Malaya ini ditujukan kepada Inggris, sedangkan serangan di Pearl Harbour ditujukan kepada Amerika Serikat. Pada hari itu pemerintah Jepang mengumumkan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat (Aiko Kurasawa, 2016:11).

Setelah sukses melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbour, pasukan Jepang segera melancarkan serangan untuk merebut beberapa wilayah di Asia Tenggara. Pasukan Jepang melancarkan beberapa operasi militer sebagai berikut:

- a. Operasi Militer ke Malaya dan Singapura.
- b. Operasi Militer ke Borneo Utara dan Filipina.
- c. Operasi Militer ke Birma.
- d. Operasi Militer ke Indonesia.

Dalam menjalankan operasi militernya, Jepang sengaja melakukan operasi dalam waktu yang bersamaan agar pihak sekutu tidak dapat mempersiapkan pasukannya.

2.1.1. Operasi Militer ke Malaya dan Singapura

Pada 8 Desember 1941 tentara Jepang mendarat di Sinkra dan Patani di Thailand dan Kotabaru di Britania Malaya. Kala itu, Kerajaan Thailand sudah ada di bawah tekanan Jepang sebelum pecahnya perang.

Pemerintah Jepang melakukan negosiasi agar tentara Jepang dapat melewati wilayah tersebut dan sudah mendapat persetujuan. Namun karena kurangnya komunikasi antara Bangkok dan Sinkra, terjadi pertempuran antara kedua tentara yang bersahabat. Singapura adalah markas besar penjajahan Inggris di Asia. Tentara Inggris menyediakan semua peralatan guna menentang pasukan musuh yang diperkirakan datang dari selatan, yaitu dari laut, dan tidak siap terhadap musuh yang akan datang dari utara.

Akan tetapi, sebelum kedatangan pasukan Jepang ke Britania Malaya, tentara Inggris telah mempersiapkan operasi pertahanan diri terhadap serangan Jepang yang dimulai dari Thailand menuju ke barat laut Malaya. Operasi pertahanan ini dikenal dengan nama “Operasi Krohcol” (Frank Owen, 2001). Tujuan dari operasi ini adalah untuk menginvasi Thailand selatan dan mengambil alih posisi vital yang strategis untuk menunda serangan dari pasukan musuh.

Di Kotabaru, Malaya, tentara Jepang mendapatkan perlawanan keras dari tentara Inggris, namun pada akhirnya Jepang memenangkan pertempuran. Pada 10 Desember, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menembak dua kapal utama milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yaitu kapal penjelajah tempur *HMS Repulse* dan kapal tempur *HMS Prince of Wales* hingga tenggelam. Kala itu, tentara Jepang sangat senang dan bersemangat atas kemenangan yang diarahi dalam menghadapi pasukan Inggris.

Jepang menguasai Pulau Penang dan Taiping pada 19 Desember 1941, Ipoh pada 3 Januari 1942, dan Kuala Lumpur pada 12 Januari 1942. Dan Jepang mengalahkan tentara Inggris yang berada di Singapura pada 15 Februari 1942.

2.1.2. Operasi Militer ke Borneo Utara dan Filipina

Serangan terhadap bagian utara Borneo, seperti Sarawak, Sabah, dan Brunei yang dijajah Inggris mulai dilakukan tentara Jepang.

Mereka menduduki ladang minyak Miri, Seria pada 16 Desember 1941 dan Kuching pada 24 Desember 1941. Hingga pada akhirnya seluruh Borneo Utara jatuh ke tangan Jepang pada 31 Desember 1941. Daerah ini diduduki oleh *Borneo Defense Garison* (Aiko Kurasawa, 2016).

Serangan ke Filipina mulai pada hari pecahnya perang, yaitu pada tanggal 8 Desember 1941. Kala itu, Filipina merupakan wilayah koloni dari Amerika. Armada Kapal Induk dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Pasukan Pesawat Terbang dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang berangkat dari Taiwan serta mengadakan serang udara setiap hari. Jarak dari Taiwan selatan dan Manila kurang lebih 900 kilometer. Tentara Amerika menduga pesawat tempur tidak mungkin bisa terbang pada jarak sejauh itu. Namun di luar perkiraan Amerika, tentara Jepang berani mengambil resiko untuk meneruskan percobaan itu dan berhasil.

Pada tanggal 9 Desember 1941, Pasukan Jepang melakukan serangan ke wilayah yang berada di sekitar Manila untuk merebut lapangan terbang. Dalam melakukan invasinya di sekitar Manila, pasukan Jepang mendapat serangan dari pesawat pengebom Amerika. Dalam penyerbuannya tersebut, pesawat pengebom Amerika berhasil merusak 2 kapal transportasi, yaitu kapal pemimpin *IJN Naga*, 1 kapal perusak, dan menenggelamkan kapal penyapu ranjau. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1941, dua hari sesudah pecahnya perang, pasukan pelopor sudah mendarat di bagian Utara Filipina dan pada tanggal 17 Desember 1941 mendarat ke Teluk Lingyen di barat laut Pulau Luzon untuk menuju ke Manila. Karena cepatnya gerak laju invasi Jepang, dan kurangnya persiapan, Pasukan Amerika memutuskan untuk meninggalkan Manila yang terus menerus diserang dari udara dan meninggalkan pusat pertahanan kota itu.

Pasukan Amerika mengundurkan diri ke Semenanjung Bataan kemudian melakukan perlawanan terakhir di Corregidor hingga akhirnya menyerah pada tanggal 7 Mei 1942 (Aiko Kurasawa, 2016).

2.1.3. Operasi Militer ke Birma

Tentara Jepang masuk ke Birma dari Thailand dengan melewati wilayah pegunungan pada tanggal 20 Januari 1942. Pasukan Sukarela Independen Birma yang dibentuk Jepang lebih dulu masuk dibanding tentara Jepang. Mereka masuk ke Rangoon (Yangon) pada tanggal 8 Maret 1942 dan mengalahkan pasukan Inggris. Dengan demikian dimulailah pendudukan Jepang. Namun sesudah itu perlawanan masih terus dilanjutkan di daerah utara sampai Mandaley jatuh pada tanggal 1 Mei 1942 (Aiko Kurasawa, 2016).

2.2. Masuknya Jepang ke Indonesia

Setelah berhasil merebut Malaya, Singapura, Borneo Utara, Filipina, dan Birma, operasi selanjutnya ditujukan ke Indonesia. Ketika Jepang mendeklarasikan perang terhadap Inggris dan Amerika, sebenarnya Belanda tidak termasuk. Namun dua hari kemudian justru pihak dari pemerintah Belanda yang mengumumkan perang kepada Jepang. Karena keluarga raja dan pemerintah Belanda mencari suaka ke London setelah Belanda diduduki oleh Jerman pada bulan Mei 1940, mereka memilih untuk memihak kepada Inggris (Aiko Kurasawa, 2016).

2.2.1. Operasi Penaklukan Sulawesi

Pada Januari 1942, pasukan militer Jepang berhasil menginjakkan kakinya di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara. Pasukan Jepang langsung bergerak cepat untuk menguasai tiga tempat utama, yaitu pangkalan udara Kalawiran, pantai utara dan selatan Kota Manado, dan Kema.

Meskipun Semenanjung Minahasa tidak mengandung bahan baku atau instalasi teknis strategis, namun nilai militernya tetap penting. Teluk Manado dan Danau Tondano menyediakan pangkalan yang bagus untuk pesawat amfibi; di tempat tersebut juga terdapat Pangkalan Angkatan Laut yang didirikan oleh Pasukan Belanda di sisi tenggara Danau Tondano, dekat Tasoeka (Tasuka). Pangkalan Pesawat Amfibi juga didirikan di bagian selatan Danau, dekat Kakas (J.J. Nortier, 1980:65).

Bersamaan dengan penyerangan di Kota Manado, pasukan Jepang juga melakukan penyerangan Kilang Minyak Tarakan. Karena jika Kilang Minyak Tarakan berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang kelak digunakan untuk membantu Jepang dari segi sumber daya dalam menguasai Hindia Belanda.

Untuk menaklukan Kota Manado, Unit Serangan Timur Jepang ditugaskan sebagai armada Jepang menurunkan beberapa divisi yang terdiri atas (Remmelink, 2018:160):

- a. Pasukan Kombinasi Pendaratan Khusus Sasebo ke-1 dan ke-2, Pasukan Angkatan Laut Pendaratan Khusus Yokosuka ke-1.
- b. Unit Pendukung dari Divisi Penjelajah ke-5 (*IJN Nachi, IJN Haguro*), Divisi Penghancur ke-6 (*IJN Ikazuchi, IJN Inazuma*).
- c. Unit Pengawal dari Skadron Penghancur ke-2 (*IJN Jintsu*), Divisi Penghancur ke-15 (*IJN Natsushio, IJN Kuroshio, IJN Oyashio, IJN Hayashio*), Divisi Penghancur ke-16 (*IJN Yukikaze, IJN Tokitsukaze, IJN Hatsukaze, IJN Amatsukaze*).

- d. Divisi Penerjun ke-11.
- e. Unit Udara ke-2 dari Divisi Pesawat Terbang Amfibi ke-2 (*IJN Chitose, IJN Mizuho*).

Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang mulai melancarkan serangan. Divisi Penerjun ke-11 diberangkatkan dengan 28 pesawat yang bertujuan untuk mengambil alih Lapangan Terbang Langoan, dan Pangkalan Pesawat Amfibi Kakas. Divisi Penerjun ke-11 memulai operasi pukul 09:52, dan berhasil mengambil lapangan terbang Langoan pada pukul 11:30 dan Pangkalan Pesawat Amfibi Kakas pada pukul 18:00. Dari 13 Januari 1942, Pasukan Kombinasi Pendaratan Khusus Sasebo melakukan pembersihan di Manado dan sekitarnya. Mereka menyelesaikan operasi pada tanggal 16 Januari 1942, dan berkumpul di Manado untuk memulai persiapan untuk menguasai Kendari (Rommelink, 2018:165).

Sebaliknya, Pasukan Angkatan Laut Pendaratan Khusus Yokosuka ke-1 terus ditempatkan di Lapangan Terbang Langoan hingga 24 April 1942, saat mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyerang pulau-pulau terdekat dengan perahu pendarat. Pasukan ini berkumpul kembali di Makassar bulan November 1942 dan dibawa kembali ke Jepang (Salecker, 2010:9).

2.2.2. Operasi Penaklukan Balikpapan dan Kendari

Antara tanggal 23-24 Januari 1942, terjadi pertempuran di Balikpapan, di lepas pantai kota dan pelabuhan produsen minyak utama, Kalimantan (Borneo). Setelah menduduki kilang minyak di Tarakan dalam Pertempuran Tarakan, Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan Mayor Jendral Shizuo Sakaguchi dari Detasemen Sakaguchi bergerak maju ke Kota Balikpapan dengan harapan kilang minyak di sana belum hancur.

Sejak tanggal 22 Januari 1942, kala itu armada Jepang terlihat bergerak ke arah selatan, formasi ke-24 dari pengebom Belanda menyerang konvoi pasukan Jepang. Meskipun dibom pada tanggal 24 Januari 1942 sekitar pukul 20:00, pasukan Jepang berhasil mendarat sekitar 5 kilometer (3 mil) di tenggara Lapangan Udara Balikpapan. Satuan penyerang mendarat tanpa bertemu perlawanan dari musuh, dan dari subuh, telah menduduki lapangan udara. Pergerakan ke arah selatan berjalan lambat karena jembatan telah dihancurkan Belanda, dan armada Jepang mencapai pinggiran utara Kota Balikpapan pada malam hari, 25 Januari 1942.

Setelah Kota Balikpapan berhasil diduduki, detasemen infantri baru yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kume Motozou tiba di Sanga-sanga, dan merebut kilang minyak yang berada di sana. Setelah berhasil menguasai daerah di sana, mereka menjaga daerah tersebut sekaligus mengumpulkan kekuatan dan informasi untuk melakukan serangan selanjutnya. Pasukan dan armada utama yang dipimpin oleh Mayor Jendral Shizuo Sakaguchi kemudian bergerak ke selatan untuk menyerang Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, yang kaya akan minyak, karet, kayu, dan batu bara.

Bersamaan dengan operasi untuk menguasai Kota Banjarmasin, pada tanggal 24 Januari 1942, armada gabungan Jepang mulai melaksanakan operasi untuk menguasai Kota Kendari dengan sasaran utamanya adalah Lapangan Udara Kendari II, karena lokasinya yang strategis dan kualitas infrastrukturnya yang bagus. Lapangan Udara Kendari II adalah salah satu pangkalan yang harus direbut pasukan Jepang untuk membangun jaringan dukungan udara yang kukuh untuk berhasil menduduki Jawa, bersamaan dengan Lapangan Udara yang berada di Sumatera Selatan, Kuching, Banjarmasin, dan Makassar.

Penguasaan Lapangan Udara ini akan memungkinkan pasukan Jepang untuk melakukan serangan udara di Jawa bagian timur, sambil mempertahankan perlindungan udara yang membentang dari Ambon ke Kupang dan Pulau Bali, di samping mendirikan pangkalan angkatan laut baru (Remmelink, 2015:4,346).

2.2.3. Operasi Penaklukan Sumatera

Sumatera adalah pulau kelima terbesar di dunia, dari barat ke timur dan hampir ke pantai selatan, terdapat sebuah bentang pegunungan yang membentang, kawasan pantai yang curam, dan sungai-sungai besar yang di antaranya dapat dilayari. Seluruh kawasan antara Palembang dan Medan dipenuhi ladang minyak. Sementara itu, timah yang dihasilkan di Bangka, Belitung, dan Singkep (tiga pulau yang berada di lepas pantai Sumatera) memiliki jumlah produksi yang sangat besar, yang membuatnya menjadi penghasil timah terbesar ketiga di dunia. Bintan, pulau lainnya yang terletak di lepas pantai Sumatera, menghasilkan bauksit yang jumlah produksinya juga sangat besar. Semua kekayaan alam Sumatera ini membuatnya menjadi sasaran yang menggiurkan bagi Jepang ketika Perang Dunia ke-2 menyebar ke Asia Pasifik pada akhir tahun 1941 (Nino Oktorino, 2019:11).

Pada dini hari tanggal 15 Februari 1942, sebuah konvoi pasukan Jepang yang terdiri dari 8 kapal berhasil mendarat di Pelabuhan Muntok yang berada di Pulau Bangka. Pendaratan pasukan Jepang di Pulau Muntok ini adalah untuk menguasai lapangan terbang yang akan digunakan untuk mendukung operasi militer di Pulau Sumatera. Pasukan yang melakukan penyerbuan ke Lapangan Terbang Muntok adalah Batalion ke-1 dari Resimen Infanteri ke-229, yang dipimpin oleh Kapten Orita Masaru.

Setelah mencapai wilayah pantai, Batalion ke-1 dari Resimen Infanteri ke-229 yang dipimpin Kapten Orita Masaru berhasil menguasai mercusuar, kota, dan Lapangan Terbang Muntok pada pukul 08:30. Meskipun di Kota Muntok ada sekitar 2,500 pasukan sekutu, mereka menyerah tanpa melakukan perlawanan (Nino Oktorino, 2019:89-90). Setelah berhasil menguasai Lapangan Terbang Muntok, pasukan Jepang segera melancarkan serangan untuk menguasai Kota Palembang.

Kota Palembang merupakan sasaran prioritas tinggi bagi pasukan Jepang di Pulau Sumatera, karena di sana merupakan lokasi dari beberapa kilang minyak terbaik di Asia Tenggara. Dengan pasokan bahan bakar yang melimpah dan lapangan terbang di daerah itu, Kota Palembang memiliki potensi yang signifikan sebagai daerah pangkalan militer. Pasukan Resimen Infanteri ke-229 dari Divisi ke-38 Jepang (yang dipimpin oleh Tanaka Ryou saburou), Resimen Infanteri ke-230 (tidak penuh), dan unit-unit pendukung memulai operasi dengan mendaratkan pasukannya di Hilir Sungai Musi. Mereka dibagi ke dalam sebuah barisan terdepan dan pasukan utama. Ke-12.360 orang prajuritnya didukung oleh 10.000 orang personel dari unit-unit udara dan pendukung lainnya (Nino Oktorino, 2019:32).

Pada pukul 06:00, pasukan Jepang tiba di Hilir Sungai Musi selaras dengan arahan yang diperintahkan oleh Armada Angkatan Laut Jepang. Operasi dimulai pada pukul 08:00 dengan membagi pasukan menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok Kanan, Kelompok Tengah, dan Kelompok Kiri (The War History Office of the National Defence College of Japan, 1967:336). Pada pukul 08:00, pasukan Jepang memulai operasi dengan berjalan mengikuti sungai hingga ke hulu. Pada pukul 19:00, pasukan Jepang berhasil menguasai Kota Palembang.

Setelah berhasil mengambil alih Kota Palembang dari Belanda, pasukan Jepang segera bersiap untuk melakukan penyerbuan ke Kota Jambi dengan kendaraan yang berhasil ditemukan.

Pasukan Jepang tiba di Kota Jambi pada tanggal 5 Maret 1942, namun karena Kota Jambi sudah ditinggalkan oleh pasukan sekutu dan warga sekitar juga ikut membantu, maka Kota Jambi dapat dengan mudah dikuasai, dan Pulau Sumatera berhasil ditundukan.

2.2.4. Operasi Penaklukan Pulau Timor

Setelah berhasil menaklukan Pulau Sumatra dan menguasai kilang minyak yang berada di sana, Pasukan Jepang tidak langsung menyerang ke Pulau Jawa, melainkan menyerang ke wilayah Timur. Karena menurut Nino Oktorino (dalam Melawan Lupa Metro TV, 2019), alasan mengapa Jepang menyerang terlebih dahulu Pulau Timor adalah karena pulau ini merupakan tempat berlabuh kapal-kapal perang sekutu yang berasal dari Australia untuk pengisian bahan bakar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa.

Selain dari itu, dengan menyerang wilayah Timur, pemerintah Hindia Belanda akan terisolir dari sekutunya, terutama Australia, dan semakin membuat tekanan kepada Hindia Belanda untuk menyerah. Pada 17 Februari 1942, mulai melakukan serangan ke Pulau Timor. Kapal-kapal pengangkut pasukan *IJN Miike-maru*, *IJN Africa-maru*, *IJN Ryouyou-maru*, dan *IJN Zen'you-maru* berlayar ke arah Selatan Kupang (The War History Office of National Defence Collage of Japan, 1967:408).

Pada 22 Februari 1942, Pasukan Jepang tiba di Kupang, dan langsung mendapat serangan dari Pasukan Sekutu. Pesawat yang dikirim oleh Armada Jepang yang terdiri dari 9 pesawat tiba pada pukul 17:00 waktu setempat, dan menjatuhkan bom di samping Pasukan Sekutu. Pada pukul 18:00, suara ledakan terdengar, hal ini menandakan bahwa bantuan serangan artileri Jepang telah menembakan artileri ke bagian samping dari pertahanan sekutu.

Pasukan Jepang segera melakukan serangan dari bagian samping pertahanan yang berhasil diledakan. Karena sudah kehabisan amunisi, Pasukan Sekutu memutuskan untuk mundur ke arah Timur dengan kendaraan. Mengetahui hal tersebut, Pasukan Jepang segera melakukan pengejaran, dan berhasil menangkap mereka di wilayah Timur Naibonak pada siang hari tanggal 23 Februari 1942.

2.3. Operasi Penyerangan Pulau Jawa

Dengan terkepungnya Pulau Jawa dari sekutu-sekutunya, Belanda menyadari bahwa wilayah yang sudah dikuasai selama lebih dari 350 tahun sebentar lagi direbut oleh Jepang. Penyerangan yang dilakukan melalui tiga arah yang terdiri dari arah utara (Kalimantan), dari arah barat (Sumatera), dan dari arah timur (Sulawesi dan Bali) berhasil membuat Pasukan Jepang mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah) pada 1 Maret 1942. Dari sini, Pasukan Jepang mulai menyerbu daerah-daerah penting hingga pusat pemerintahan Belanda di Pulau Jawa yang nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Pasukan Militer Jepang di Indonesia.

2.3.1. Pertempuran di Laut Jawa

Sebelum melakukan pendaratan di Pulau Jawa, Pasukan Jepang perlu menghadapi armada pertahanan Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Karel Willem Frederik Marie Doorman (Klemen L, 1999-2000) di pertempuran Laut Jawa. Pada 27 Februari 1942, Armada Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Takagi Takeo (Klemen L, 1999-2000) mulai memasuki Timur Laut Jawa.

Konvoi Pasukan Jepang dikawal oleh 2 kapal penjelajah berat (*IJN Nachi*, dan *IJN Haguro*), 2 kapal penjelajah ringan (*IJN Naka*, dan *IJN Jintsuu*), dan 14 kapal perusak (*IJN Yuudachi*, *IJN Samidare*, *IJN Murasame*, *IJN Harusame*, *IJN Minegumo*, *IJN Asagumo*, *IJN Yukikaze*, *IJN Tokitsukaze*, *IJN Amatsukaze*, *IJN Hatsukaze*, *IJN Yamakaze*, *IJN Kawakaze*, *IJN Sazanami*, dan *IJN Ushio*) di bawah komando Laksamana Muda Nishimura Shouji.

Sedangkan armada pertahanan Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman terdiri atas 2 kapal penjelajah berat (*HMS Exeter*, dan *USS Houston*), 3 kapal penjelajah ringan (*HNLMS De Ruyter*, *HNLMS Java*, dan *HMAS Perth*), dan 9 kapal perusak (*HMS Encounter*, *HMS Jupiter*, *HNLMS Kortenaer*, *HNLMS Witte de With*, *USS Alden*, *USS John D. Edwards*, *USS John D. Ford*, *HMS Electra*, dan *USS Paul Jones*) (Oktorino, 2018:61-62).

Pada awal pertempuran, Armada Sekutu berada di posisi yang tidak menguntungkan karena armadanya berada dalam posisi “T” sehingga hanya dapat menembakan meriam yang berada di haluan kapal terdepan. Karel Doorman kemudian segera menjajarkan posisi sehingga dapat mengarahkan seluruh meriam armadanya. Beberapa saat setelah kapal-kapal Armada Sekutu memosisikan meriamnya, kapal penjelajah ringan *HNLMS De Ruyter* terkena tembakan pada ruang mesinnya, namun peluru yang mengenainya tidak meledak.

Selama 1 jam saling menembak, kapal penjelajah berat *HMS Exeter* terkena peluru kaliber 20.3 cm (8 Inch) dari kapal penjelajah berat *IJN Nachi*. Peluru itu mengenai meriam dan tembus hingga ke ruang mesin, sehingga menurunkan daya listrik, dan kapal mulai mengalami penurunan kecepatan, diikuti keluarnya kapal dari formasi. Akibat dari insiden ini, kekacauan mulai terjadi.

Kapal-kapal dari Armada Sekutu yang melihat kejadian tersebut menganggap aksi yang dilakukan oleh *HMS Exeter* merupakan sebuah manuver, dan mulai mengikutinya.

Kapal penjelajah ringan *HNLMS De Ruyter* bersama dengan Laksamana Karel Doorman ditinggalkan berjuang sendiri. Menyadari hal ini, Laksamana Karel Doorman segera memutar arah dan mengejar kapal-kapal sekutu yang lain. Melihat manuver yang dilakukan armada kapal sekutu, Laksamana Takagi segera memerintahkan armada kapalnya untuk meluncurkan serangan torpedo kapal mereka. Dari serangan torpedo tersebut, *HNLMS Kortenaer* menjadi korban pertama yang terkena dari salah satu torpedo armada kapal Jepang dan membuat lambung kapalnya terbelah menjadi dua.

Setelah kondisi menjadi sedikit lebih tenang, kapal *HMS Exeter* diperintahkan oleh Laksamana Karel Doorman untuk kembali ke Surabaya dengan dikawal oleh *HNLMS Witte de With* karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertempuran (Naval History and Heritage Command U.S. Navy, 2017:56).

Menjelang malam, Karel Doorman berusaha melarikan diri dan tiba di pesisir Pulau Jawa pada pukul 21:00. Thomas H. Binford, komandan dari Divisi Kapal Perusak ke-58 Amerika (dalam Naval History and Heritage Command U.S. Navy, 2017:60) mengatakan bahwa kita harus kembali ke Surabaya, sudah tidak ada gunanya lagi kita bertempur, terlebih lagi mereka kehabisan peluru dan torpedo. Mendengar ucapan dari Binford, Karel Doorman memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Ketika dalam perjalanan, pada pukul 21:25, *HMS Jupiter* tenggelam setelah mengalami ledakan karena terkena ranjau yang dipasang oleh pasukan Hindia Belanda beberapa hari sebelumnya.

Pada pukul 22:30, Armada Sekutu berpapasan dengan Armada Jepang. Kedua pihak saling bertukar serangan tembakan meriam, namun agak lambat karena awak kapal dari kedua kubu sudah sangat letih.

Laksamana Takagi Takeo bersama dengan kapal-kapal penjelajah beratnya (*IJN Nachi* dan *IJN Haguro*) berusaha mendekati Armada Sekutu dan melakukan serangan torpedo, dan berhasil mengenai *HNLMS Java* dan *HNLMS De Ruyter*.

Dari serangan torpedo itu, kapal penjelajah ringan *HNLMS Java* meledak dan tenggelam setelah terkena serangan torpedo yang membuatnya terbelah dua. Tidak lama kemudian, kapal penjelajah ringan *HNLMS De Ruyter* juga tenggelam bersama Laksamana Karel Doorman akibat terkena serangan torpedo.

Setelah tenggelamnya dua kapal penjelajah ringan Belanda, kapal penjelajah ringan Australia (*HMAS Perth*) mengambil alih komando armada. Menyadari bahwa pertempuran tersebut tidak mungkin untuk dimenangkan, *HMAS Perth* memerintahkan *USS Houston*, dan kapal yang tersisa untuk mundur ke Tanjung Priok.

2.3.2. Pertempuran di Selat Sunda

Setelah pertempuran sengit melawan Armada Jepang di Laut Jawa, Armada Sekutu yang terdiri dari *HMAS Perth*, *USS Houston*, dan kapal lainnya yang tersisa berlayar memasuki Selat Sunda untuk mencari bahan bakar dan amunisi. Kala itu di waktu yang bersamaan, pada tanggal 28 Februari 1942, konvoi Penyerang Barat Pulau Jawa pimpinan Imamura Hitoshi tiba di Teluk Banten dengan membawa kawalan lengkap armada kapalnya.

Kapal penjelajah ringan *HMAS Perth* dan kapal penjelajah berat *USS Houston* yang tiba di perairan Selat Sunda, ternyata telah berada dalam kepungan kapal-kapal dari konvoi armada Jepang Penyerang Barat Pulau Jawa setelah *USS Houston* menembakan peluru suar untuk memberikan pencahayaan malam. Meskipun dalam keadaan terpojok, *USS Houston* dan *HMAS Perth* memberikan perlawanan gigih. Mereka menembakan meriam dari jarak dekat.

Serangan dari kedua Armada Sekutu tersebut berhasil menenggelamkan kapal angkut *IJN Ryuujo-maru*, dan memaksa Letnan Jendral Imamura Hitoshi yang memimpin pendaratan ke Pulau Jawa, melompat ke laut (Oktorino, 2018:96). *HMAS Perth* tiba-tiba terkena hantaman empat torpedo, dan peluru 20.3 cm (8 Inch), yang berasal dari sebuah kapal penjelajah. Kapal tersebut tenggelam dalam beberapa menit dan meninggalkan *USS Houston* sendirian bertempur.

Setelah berhasil menenggelamkan kapal *HMAS Perth*, kapal-kapal Jepang mulai memfokuskan serangan kepada kapal *USS Houston*. Setelah terkena 3 torpedo, dan tembakan meriam yang merusak kerangkanya, *USS Houston* akhirnya tenggelam.

2.3.3. Menyerahnya Pemerintah Belanda Kepada Militer Jepang

Dengan hancurnya Armada Sekutu pada pertempuran di Laut Jawa dan di Selat Sunda, Pemerintah Belanda kala itu sudah tidak memiliki pertahanan. Pada 1 Maret 1942, Pasukan Jepang berhasil mendarat secara bersamaan di tiga titik di Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah). Empat hari setelah pendaratan, pasukan Jepang berhasil menguasai Kota Batavia, dan mereka memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda Van Starckenborgh Strachouwer yang kala itu menjabat untuk mundur ke Lembang, Bandung.

Pada sore hari, tanggal 7 Maret 1942, Pasukan Jepang berhasil masuk ke Lembang. Jepang berhasil memaksa pasukan Belanda yang kala itu berada di bawah pimpinan Letnan Jendral Ter Poorten untuk melakukan gencatan senjata. Dalam gencatan senjata ini, Letnan Jendral Imamura Hitoshi mengirim pesan kepada Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborgh Strachouwer untuk mengadakan perundingan paling lambat pada 8 Maret 1942, jika tidak dilakukan, Jepang akan melakukan pengeboman di Bandung.

Melihat perkembangan yang semakin kritis dan melakukan berbagai macam pertimbangan, Letnan Jendral Ter Poorten dan Gubernur Jendral Tjarda Van Starckenborgh Strachouwer mengutus seseorang, untuk menghubungi Letnan Jendral Imamura Hitoshi dalam upaya melakukan perundingan.

Kemudian pada 8 Maret 1942, Gubernur Jendral Tjarda Van Starckenborgh Strachouwer menandatangani Perjanjian Kalijati. Inti dari Perjanjian Kalijati adalah pihak Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang tanpa persyaratan apapun, pembentukan pemerintahan militer Jepang untuk Pulau Jawa, Madura berpusat di Kota Batavia, Pulau Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, dan pemerintahan untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku berpusat di Makassar.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, maka penjajahan Indonesia oleh Belanda telah berakhir, dan dimulainya masa penjajahan oleh Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan hanya pada dua hal, yaitu:

1. Menghapus pengaruh-pengaruh Budaya Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Jepang kemudian mendirikan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia yang disebut *Gunseikanbu*. Sedangkan Pemimpin Militer disebut *Gunseikan* atau *Saikou Shikikan*. Kekuasaan atas Hindia Belanda (Indonesia) kemudian berada di bawah pimpinan Marsekal Terauchi, tentara Jepang Wilayah Selatan yang bermarkas di Dalat, Vietnam.

Pemerintahan Militer Jepang kemudian membagi wilayah Hindia Belanda (Indonesia) menjadi tiga daerah pemerintahan di bawah dua angkatan perang Jepang, yaitu *Rikugun* (Angkatan Darat) dan *Kaigun* (Angkatan Laut). Adapun pembagian tiga pemerintahan militer tersebut adalah sebagai berikut (Nino Oktorino, 2019:14):

1. Pulau Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Tentara ke-16 (*Osamu shudan*) yang berpusat di Jakarta.
2. Pulau Sumatera di bawah pemerintahan Tentara ke-25 (*Tomi shudan*) yang berpusat di Singapura.
3. Pulau Kalimantan dan Indonesia bagian timur di bawah pemerintahan Armada Selatan ke-2 (*Dai Ni Nanken-kantai*) yang berpusat di Makassar.

2.4. Imperialisme Jepang di Indonesia

Kehidupan masyarakat Indonesia kala itu sangat memprihatinkan. Tenaga dan sumber daya Indonesia diperas demi kepentingan militer Jepang dalam Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya). Namun, berkat invasi militer Jepang pula Indonesia bisa mempunyai angkatan perang yang terlatih dan merdeka pada 17 Agustus 1945.

Dengan keberhasilan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan pemerintahan Belanda yang berkuasa kala itu, dimulailah era kekuasaan baru oleh militer Jepang di Indonesia. Dalam pendudukannya, masyarakat Indonesia diarahkan untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya) dan menerapkan beberapa kebijakan yang terlihat sangat baik.

Salah satu dari kebijakan tersebut adalah hak prerogratif yang diperlakukan secara khusus untuk kelompok aristokrat dan penurunan gaji para pejabat yang lebih tinggi. Jepang juga melakukan beberapa aksi propaganda kepada rakyat Indonesia yang mereka arahkan untuk meraih dukungan. Propaganda yang dilancarkan Jepang ini pun berhasil memunculkan simpati yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia.

Namun demikian, terdapat juga dampak negatif dari kekuasaan Jepang antara lain adalah penghinaan, eksploitasi, dan kekejaman lainnya yang merupakan upaya Jepang untuk memenangkan perang (Mukhlis PaEni, 2009:285).

Selain itu, propaganda yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang juga dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Di sisi lain, dalam propagandanya membangun Asia Raya, Jepang juga banyak memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh politik di Indonesia agar tampil di pemerintahan membantu *Dai Nippon* serta membantu membangun tanah airnya.

Dari kebijakan yang diterapkan, ada beberapa bidang yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Indonesia kala itu, yakni:

1. Bidang Politik

Jepang melakukan perombakan terhadap struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan kaidah Imperialisime Jepang, kewajiban untuk melakukan *seikerei* (penghormatan dengan cara membungkuk ke arah Tokyo) setiap pagi pada *Tennou Heika* (Kaisar Jepang) saat melakukan upacara bendera, Jepang mencoba merangkul tokoh-tokoh politik dan agama di Indonesia dengan tujuan menarik dukungan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya), masyarakat Indonesia diwajibkan memakai bahasa Jepang dan menghapus bahasa Belanda, Jepang memberlakukan sistem pemerintahan militer dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT), dan pembentukan suatu organisasi berbasis propaganda yang bertujuan untuk menarik hati rakyat Indonesia.

2. Bidang Sosial dan Ekonomi

Jepang melakukan *Romusha* (kerja paksa) yang dilakukan oleh pemuda di Indonesia, menjadikan pemuda Indonesia sebagai serdadu perang di bawah arahan Jepang (seperti *Seinendan*, *Fujinkai*, *Keibodan*, *Heiho*, dan PETA), mengambil alih semua kegiatan ekonomi Indonesia demi mendukung perang, mewajibkan rakyat Indonesia untuk memberikan 30 persen hasil panen kepada militer Jepang, menutup perkebunan tebu dan pabrik gula oleh Jepang sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang berakibat berkurangnya kegiatan ekonomi dan membuat masyarakat Indonesia tidak mendapatkan bahan makanan dan terjadilah wabah penyakit, jumlah gelandangan bertambah di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Lalu Pemerintah Militer Jepang juga melakukan berbagai macam kegiatan propaganda, pembentukan lembaga dan organisasi-organisasi untuk menarik lebih banyak minat dan simpatis dari tokoh-tokoh besar atau politik Indonesia untuk dimanfaatkan kharismanya dalam mendukung perang dan memobilisasi rakyat Indonesia sesuai kehendak Jepang terlepas dari penderitaan yang dialami rakyat Indonesia kala itu.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang di antaranya sebagai berikut:

- a. Eksploitasi Sumber Daya (Alam dan Manusia) di Pedesaan.
- b. Propaganda *Romusha* (Eksploitasi Tenaga Kerja).
- c. Pembentukan Lembaga dan Organisasi Sosial-Politik.

Demi mewujudkan kegiatan tersebut, pihak pemerintahan militer Jepang membuat propaganda yang menyerukan bahwa mereka berada di pihak rakyat Indonesia.

2.4.1. Eksploitasi Sumber Daya di Pedesaan

Politik Imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Jepang melakukan eksploitasi sampai ke tingkat pedesaan.

Demi melancarkan aksinya, pemerintah militer Jepang memberikan perhatian besar tentang “menyita hati rakyat” (*minsbin ba'aku*) dan bagaimana “mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka” (*senbu kousaku*). Pemerintah Militer Jepang berpikir bahwa orang Indonesia harus sepenuhnya dibentuk ke dalam pola tingkah laku dan cara berpikir Jepang. Propaganda kemudian dirumuskan sebagai suatu upaya untuk mengindoktrinasi rakyat Indonesia sehingga bisa menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Timur Raya (Aiko Kurasawa, 2015:247).

Dan dalam usaha mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, pemerintah militer Jepang melakukan usaha transformasi di bidang pertanian dengan mengenalkan bibit dan jenis tanaman baru, inovasi teknik, perluasan areal tanam, pendidikan untuk para petani, propaganda dan kampanye. Adapun jenis-jenis tanaman baru yang diperkenalkan yaitu kapas, yute-rosela dan rami, sisal dan tanaman jarak.

Jenis-jenis tanaman baru tersebut dapat menghasilkan salah satu barang atau bahan sandang paling langka selama pendudukan Jepang, baik untuk pakaian maupun karung goni. Lebih lanjut lagi, untuk mengalokasikan lebih banyak tanah dan tenaga kerja bagi produksi tanaman-tanaman “penting”, penanaman tanaman-tanaman produksi “*cash crops*”, seperti teh, kopi, dan tebu cukup banyak dikurangi karena ketiadaan pasar akan mengakibatkan kelebihan produksi.

Dengan demikian, para petani di bawah pendudukan militer Jepang hampir tidak memiliki kebebasan di dalam memilih tanaman yang bisa ditanam di tanah mereka sendiri.

Produksi tanaman pokok dijadwalkan oleh pemerintah pusat, dan petani, yang kebebasan dalam memilihnya hilang, harus mengikuti rencana ini dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam di atas tanah mereka sendiri.

Perubahan mendadak dalam kerutinan penanaman menyebabkan munculnya kebingungan dalam kehidupan para petani. Terutama pada tahun pertama, kadang-kadang terjadi tanaman yang sudah ditanam diperintahkan supaya dicabut kembali dan diganti dengan tanaman yang dianjurkan pemerintah. Sedangkan penanaman tanaman baru seperti kapas, yute, rosela, dan jarak, dalam beberapa hal berhasil sehingga mengurangi kelangkaan pakaian dan minyak sampai ke tingkat tertentu.

Dalam proses menjalani pertanian terkontrol ini, petani mengalami berbagai perubahan dalam hidup mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka tersentuh arus informasi dan teknik baru dalam pertanian, seperti metode penanaman padi dan pembuatan pupuk kompos. Mereka juga terlibat dalam rencana-rencana baru seperti perlombaan produksi terbesar dan jika berhasil, pemimpin dan penduduk desa akan menikmati penghargaan serta hadiah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Komunikasi dengan dunia di luar desa menjadi semakin lancar.

Sonchou (Camat) dan pejabat lainnya sering berkunjung ke desa untuk memberi perintah, membujuk, menghimbau, mendorong, serta memaksa para petani untuk memenuhi keinginan pemerintah. Petani sering pergi ke luar desa untuk mengikuti pelatihan, menghadiri pertemuan, menjadi tenaga kerja paksa, dan menyelundup. Semuanya membawa pengaruh pada kehidupan monoton petani, dan memberikan semacam dorongan bagi dinamisme pergerakan di masyarakat pedesaan.

Di samping menciptakan dampak-dampak psikologis, kebijakan pertanian Jepang mensyaratkan petani supaya mencurahkan banyak tenaga fisik mereka dalam berbagai kegiatan baru yang dibuat pemerintah, oleh karena itu kehidupan sehari-hari para petani menjadi sangat sibuk.

Dan dapat dikatakan bahwa berbagai kegiatan baru dan gagasan perangsang mungkin sangat menggairahkan petani, akan tetapi secara fisik mereka sangat diperlemah. Selain itu, dilihat dari prespektif yang lebih luas, kebijakan pertanian Jepang mempunyai dampak yang serius atas struktur perekonomian, khususnya di Pulau Jawa.

Selain menjalani pertanian terkontrol oleh pemerintahan pusat, para petani juga diharuskan untuk menyerahkan sejumlah tertentu dari hasil panen padi mereka kepada pemerintah. Padi yang diserahkan akan digiling dan didistribusikan melalui tangan pemerintah. Penggilingan dan pedagang beras yang ada tidak lagi diizinkan untuk beroperasi atas prakarsa mereka sendiri, akan tetapi hanya diperbolehkan beroperasi sebagai agen-agen teknis *Shokuryou Kanri Zimusho* (Kantor Pengelolaan Makanan), yang diizinkan mengolah atau menangani beras dengan imbalan tertentu.

Pemerintah pusat juga menetapkan petunjuk dasar mengenai penyerahan padi, yang dapat disimpulkan sebagai berikut (Aiko Kurasawa, 2015:82):

1. Petani diharuskan menjual sejumlah kuota tertentu dari produksi mereka kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
2. Padi harus diserahkan ke penggilingan beras yang telah ditunjuk melalui pemerintah desa.
3. Apabila petani masih memiliki surplus untuk dijual, setelah menyerahkan kuota yang ditetapkan, mereka hanya diperbolehkan menjualnya ke penggilingan yang terdaftar dan tidak diizinkan untuk menjual kepada tengkulak atau ke pasar setempat. Dan petani dilarang menubuk gabah untuk kepentingan komersial tanpa izin pemerintah.

Wajib serah padi telah dimulai di Jepang pada Oktober 1940, dengan dikeluarkannya *Beikoku Kanri Kisoku* (Peraturan untuk Kontrol Beras), dan dalam banyak hal, kebijakan, khususnya di Pulau Jawa, merupakan tiruan dari hal yang sama di Jepang pada masa perang (Aiko Kurasawa, 2015:82).

Setelah beras digiling di tempat penggilingan padi, kemudian diserahkan dan ditampung di kantor pusat persatuan penggilingan padi di setiap keresidenan, dan jumlahnya dilaporkan ke kantor keresidenan. Beras yang terkumpul di setiap keresidenan dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk konsumsi di dalam keresidenan dan untuk konsumsi di luar keresidenan, termasuk beras untuk kepentingan militer (Angkatan Darat dan Angkatan Laut), ekspor, serta pemasokan ke keresidenan lain.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, petani dipaksa supaya menyerahkan sejumlah besar padi yang mereka hasilkan, dan di pihak lain mereka tidak mampu membeli beras di pasar. Hal yang membuat kebijakan ini terasa lebih kejam adalah kebanyakan petani, khususnya di Pulau Jawa, terbiasa menghasilkan pada secukupnya untuk dikonsumsi mereka sendiri, dan sedikit sekali yang dijual ke pasar. Mereka menderita kemiskinan yang kronis, dan hampir terlibat utang, serta terikat sistem *ijon*². Dengan adanya sistem ini, para petani tidak memiliki kontrol penuh atas hasil mereka sendiri. Setelah mereka membayar utang dalam bentuk padi yang dipanen, biasanya hanya sedikit yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil hasil panen yang dapat dijual oleh para petani (Aiko Kurasawa, 2015:114).

Dengan demikian, kebijakan Jepang mengenai wajib serah padi mengakibatkan tekanan yang luar biasa dan penderitaan besar atas kehidupan petani. Selain itu juga mempunyai dampak sosial lainnya. Pemimpin desa, yang seharusnya mewakili kepentingan petani *vis-à-vis* (berhadapan langsung) pemerintah pusat, sesungguhnya ditempatkan pada suatu posisi untuk bertindak lebih sebagai agen pemerintah. Merekalah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kuota serah padi, dan mereka akhirnya melakukan tekanan secara langsung atas petani.

² *Ijon*, yaitu kredit yang diberikan kepada petani, nelayan atau pengusaha kecil yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah (kbbi.kemendikbud.go.id).

2.4.2. Propaganda *Romusha*: Eksploitasi Tenaga Kerja

Banyak sekali propaganda-propaganda yang dilaksanakan oleh pemerintah militer Jepang. Salah satu yang sangat terkenal kala itu dalam pendudukan militer Jepang di Indonesia adalah *Romusha*. Bagi seorang Indonesia, *Romusha* berarti seorang buruh kuli yang dimobilisasikan bagi pekerjaan kasar di bawah kekuasaan militer Jepang. Mereka pada umumnya petani biasa, yang diluar kehendak mereka, diperintahkan supaya bekerja pada proyek-proyek pembangunan dan pabrik, atau tenaga kerja Industri.

Jutaan orang dimobilisasikan dengan cara ini dan tidak sedikit di antaranya yang dikirim ke luar negeri. Banyak di antaranya juga meninggal karena kerja keras dan mengalami siksaan atau kondisi kesehatan yang buruk. Banyak lainnya juga, yang beruntung dan dapat bertahan hidup, menderita akibat penyakit, kekurangan gizi, dan luka-luka. Bagi keluarga mereka yang ditinggal dan dibawa pergi, menderita kemiskinan, dan tanah pertanian mereka dibarkan tidak terurus akibat langkanya tenaga kerja.

Pada awal perekrutan *Romusha*, pihak Jepang memang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak. Hal ini dilakukan sebagai usaha pembangunan sarana penunjang perekonomian dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan produksi. Dalam hal menjalankan proyek-proyek tersebut, pihak pemerintahan militer Jepang menganggap bahwa melimpahnya tenaga kerja di Jawa sebagai salah satu sumber daya terpenting. Peningkatan perekrutan untuk para *Romusha* terjadi ketika situasi perang semakin berkobar pada pertengahan tahun 1943 dan permintaan pembangunan benteng-benteng dari serangan udara di berbagai tempat serta pembangunan jalan-jalan bawah tanah atau rel kereta api untuk mempermudah pergerakan tentara Jepang di medan perang (Aiko Kurasawa, 2015:132-133).

Propaganda-propaganda dalam perekrutan *Romusha* kemudian dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwa *Romusha* merupakan pekerjaan yang sangat mulia.

Berbagai saluran propaganda dapat dilihat bahwa *Romusha* lebih baik dan lebih mulia daripada *koeli kontrak* pada saat Belanda masih berkuasa kala itu. Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan militer Jepang memposisikan dirinya sebagai pihak yang sama-sama memiliki sikap anti Barat, sebuah sikap yang sama dengan rakyat kebanyakan kala itu. Memanfaatkan hal ini, pemerintahan militer Jepang dapat dengan mudah mencitra-burukan Belanda, sekaligus dapat dengan mudah merekrut rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja *Romusha* yang menjadi kebutuhan bagi pemerintahan militer Jepang pada saat itu (Dio Yulian Sofansyah, 2019:66-67).

Sebuah buku perekrutan *Romusha* menetapkan jenis-jenis pekerjaan di mana tenaga kerja *Romusha* diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan bala tentara dan pembelaan tanah air.
2. Memperbaiki dan menambah produksi bahan-bahan keperluan bala tentara, persenjataan, bahan makanan, serat, dan minyak jarak.
3. Menambah penghasilan bahan-bahan makanan yang penting.
4. Menyelenggarakan pengangkutan dan perhubungan.
5. Pekerjaan penting lainnya pada masa perang.

Pekerjaan yang termasuk dalam kategori-kategori tersebut, di antaranya, pembangunan infrastruktur, lapangan terbang, benteng pantai, lubang perlindungan, parit perlindungan, dan pabrik amunisi, yang semuanya membutuhkan pekerjaan kasar yang berat (Aiko Kurasawa, 2015:155-156).

2.4.3. Pembentukan Lembaga dan Organisasi Sosial-Ekonomi-Politik Baru

Beberapa aspek kebijakan sosial ekonomi Jepang yang ditunjukkan pada mobilisasi besar-besaran penduduk desa, perlu didukung dengan lembaga-lembaga pada tingkat masyarakat biasa untuk mendukung kebijakan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah militer Jepang memutuskan untuk membentuk dua lembaga penting, yaitu *Tonarigumi* (Rukun Tetangga), dan *Kumiai* (persekutuan koperasi bergaya Jepang). Kedua lembaga ini mencontoh lembaga-lembaga yang sudah ada di Jepang, dan berlaku sebagai landasan kelembagaan demi meningkatkan kontrol Jepang atas masyarakat di desa. Dengan kata lain, lembaga ini merupakan alat untuk melakukan campur tangan langsung atas kehidupan rakyat kala itu.

Tonarigumi, atau Rukun Tetangga (RT), adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang yang secara resmi diperkenalkan, khususnya di Jawa, pada Januari 1944. Pada jenjang paling rendah, *Tonarigumi* terdiri dari 10 atau 20 rumah tangga untuk memperketat kontrol pemerintah atas penduduk, serta untuk meningkatkan komunikasi dengan mereka. Lembaga ini adalah tiruan dari rukun tetangga yang berada di Jepang, dengan nama Jepang yang sama juga (Aiko Kurasawa, 2015:209).

Fungsi dan peran *Tonarigumi* yang dibentuk di Indonesia kala itu menurut program pemerintah yang diumumkan pada 11 Januari 1944, kegiatan utamanya meliputi (Jawa Nengan, dalam Aiko Kurasawa, 2015:217):

- a. Membantu *Keiboudan* (organisasi keamanan) dalam mempertahankan tanah air dan melawan serangan udara, kebakaran, mata-mata, dan penjahat.
- b. Memberi tahu rakyat mengenai perintah, peraturan, dan petunjuk pemerintah, serta menyadarkan mereka.
- c. Membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain.
- d. Mendistribusikan catu barang (jatah suatu barang, makanan, dan sebagainya yang sudah ditentukan banyaknya).

- e. Bekerja sama dengan pemerintah militer dalam urusan militer dan menjalankan pelayanan lain.
- f. Memajukan gotong royong di kalangan penduduk.

Fungsi ini bisa dibandingkan dengan fungsi *Tonarigumi* di Jepang (Aiko Kurasawa, 2015:218):

1. Menyampaikan perintah dari pemerintah dan menyadarkan penduduk akan perintah tersebut (mirip dengan fungsi “b”).
2. Memberi tahu gambaran situasi masyarakat kepada penguasa.
3. Mendistribusikan makanan dan komoditas lain yang telah dijatah (mirip dengan fungsi “d”).
4. Mencegah sabotase, kegiatan-kegiatan yang tidak patriotik, mata-mata, dan sebagainya sehingga meredakan keluhan dan penolakan rakyat (mirip dengan fungsi “a”).
5. Menawarkan bantuan dan pertolongan kepada tetangga dalam keadaan darurat (mirip dengan fungsi “f”).
6. Upaya kolektif untuk mencegah kebakaran dan bertahan melawan serangan udara musuh (mirip dengan fungsi “a”).
7. Mensponsori pesta perpisahan dan penyambutan prajurit setempat yang direkrut.
8. Mengumpulkan barang bekas yang bisa dimanfaatkan kembali.
9. Peningkatan tabungan.
10. Sensus dan registrasi.

Dapat dikatakan bahwa *Tonarigumi* di Jepang dan di Indonesia menyanggah fungsi-fungsi yang sama, dengan sedikit perbedaan tekanan karena lingkungan yang berbeda. Pada kedua kasus, di masyarakat pedesaan, *Tonarigumi* dianggap sebagai lembaga untuk membantu pemerintah desa karena beban kerja pemerintah yang meningkat akibat situasi perang.

Berikutnya ada *Kumiai*, atau koperasi bergaya Jepang, merupakan sebuah lembaga penting lainnya yang dibentuk Jepang pada tingkat desa. *Kumiai* bertugas sebagai unit dasar untuk memanipulasi seluruh struktur perekonomian yang dikendalikan semasa perang.

Kala itu, sudah ada beberapa koperasi pada zaman Belanda, dan dibentuk sebagai sarana memperkuat kedudukan ekonomi bagi kaum pribumi. Namun, koperasi pada zaman Belanda tidak berkembang dengan baik. Pada 1939, hanya terdapat 516 koperasi lokal tanpa jaringan nasional. Selain itu, tiga perempatnya adalah koperasi kredit, koperasi produksi, konsumsi, dan *lumbung*³ yang hanya berjumlah 111 (Indisch Verslag, dalam Aiko Kurasawa, 2015:228).

Kemudian di bawah pemerintahan Jepang, pemerintah mulai usaha aktif melakukan reorganisasi koperasi yang ada serta membentuk yang baru, segera setelah mereka memerintah. Upaya-upaya diperkuat dengan mengundang program baru yang disebut “Soesoenan Perekonomian Baroe oentoek Rakjat di Djawa” (*Jawa Juumin Keizai Shintaisei*). Kebijakan Jepang menyangkut koperasi yang paling jelas dan sistematis terlihat dari program yang diumumkan pada Hari Ulang Tahun Kaisar, yaitu 29 April 1944 (Benda, Irikura, & Kishi, 1965:107-132).

Di antara koperasi yang sebelumnya disebut, yang paling berdampak keras pada rakyat pedesaan adalah berbagai jenis koperasi tani. Di banyak keresidenan, jenis ini disebut *nougyou kumiai*. Koperasi tersebut dibentuk menurut model Jepang yang telah dipromosikan pemerintah pada tahun 1930-an sebagai unit dasar untuk menjalankan pengumpulan padi (Kubota Mitsuaki, 1943:123-124).

³ *Lumbung*, yaitu tempat menyimpan hasil pertanian, umumnya padi (kbbi.kemendikbud.go.id).

Seperti lembaga serupa di Jepang, fungsi utama koperasi pertanian, khususnya di Jawa, yaitu mengumpulkan hasil pertanian bagi keuntungan pemerintah. Akan tetapi, di banyak keresidenan pun menjalankan peran membagi jatah barang yang telah ditentukan pada penduduk setempat.

Selain lembaga, pemerintahan militer Jepang juga berusaha menjangkau penduduk pedesaan dengan cara langsung. Pemerintah Jepang berusaha mengorganisasikan mereka ke dalam berbagai organisasi sekaligus melatihnya. Dengan begitu, akan membuat mereka lebih bermanfaat dan menjadi kooperator yang bisa dipercaya dalam upaya-upaya perang Jepang. Usaha-usaha ini dapat juga disebut “mobilisasi massa” dalam artian yang terbatas, yang pada akhirnya memunculkan akibat tertentu dalam mendorong dan mengubah mentalitas sebagian penduduk pedesaan.

Pembentukan organisasi ini berlangsung di banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti; politik, ekonomi, sosial-budaya, sampai militer. Mobilisasi massa ini dilakukan demi mendukung Jepang dalam Perang Pasifik (Perang Asia Timur Raya).

Beberapa organisasi yang dibentuk pemerintahan militer Jepang di bidang politik di antaranya: Gerakan 3A, PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Jawa), dan *Sendenbu* (Kelompok Propaganda). Sedangkan organisasi di bidang militer yaitu: *Seinendan* (Barisan Pemuda Indonesia), *Keiboudan* (Organisasi Keamanan), *Fujinkai* (Himpunan Wanita), *Heiho* (Organisasi Tentara Cadangan), PETA (Pembela Tanah Air), dan lain-lain. Organisasi PUTERA dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti; Ir. Soekarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansoer (Nino Oktorino, 2019:16).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh militer Jepang dalam memasuki wilayah Indonesia membutuhkan proses yang panjang. Namun berkat perjuangan yang gigih dari pasukannya, Jepang berhasil masuk dan merebut kekuasaan dari tangan sekutu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat segera diterapkan oleh pemerintah militer Jepang untuk mencapai tujuan dan kebutuhan pokok mereka. Membuat berbagai propaganda yang seolah-olah terlihat baik dan menguntungkan bagi kedua pihak, namun sebenarnya hanya untuk mendapatkan dukungan suara dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia agar mereka turut membantu militer Jepang dalam memperoleh hati masyarakat Indonesia untuk membantu pihak militer Jepang dalam keterlibatannya di Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya.

